

## PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Adelia Riyan Nandini<sup>1</sup>, Zulfahmi Yasir Yunan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

\* [adeli.nandini19@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:adeli.nandini19@mhs.uinjkt.ac.id)

### Abstrak

Bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia berdampak pada korban jiwa serta kerugian materil, sehingga dibutuhkan penanggulangan bencana yang baik dan benar untuk menghadapi dampak dari bencana alam. Namun pada pelaksanaannya, sering terjadi ketidaksesuaian antara upaya penanggulangan bencana dengan berbagai kebutuhan penyandang disabilitas yang membuat kelompok tersebut semakin rentan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji upaya penanggulangan bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia agar lebih peka terhadap kebutuhan setiap jenis disabilitas. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana. Hal mudah yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan pengetahuan mengenai penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus mereka pada pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan diharapkan masyarakat lebih mengenal dan menerima penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pekerja sosial memiliki peran untuk memberikan penanggulangan bencana yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas. Perlu adanya kerjasama lintas sektoral dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, serta pihak LSM dalam rangka menghasilkan data disabilitas yang akurat dan tidak simpang siur antar lembaga/organisasi. Penguatan kapasitas juga dapat dilakukan melalui penguatan sosial ekonomi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Pekerja Sosial, Penanggulangan Bencana.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia tidak jarang mengalami fenomena bencana alam karena kondisi geografisnya. Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa manusia, bahkan berdampak kepada psikologis.

Penanggulangan bencana yang baik dan benar dibutuhkan untuk menghadapi dampak dari bencana alam, baik itu pra bencana atau mitigasi bencana, maupun pasca bencana. Sesuai dengan UU 24/2007,

penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga upaya tersebut masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam menghadapi bencana alam. Pada pelaksanaan tanggap bencana, penyandang disabilitas seringkali tidak mendapat perhatian dalam mengakses bantuan darurat dan layanan penting seperti makanan, perawatan medis, tempat tinggal dan sanitasi (Probosiwi, 2013).

Penyandang disabilitas memiliki resiko yang tinggi saat terjadi bencana, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki dan juga dikarenakan keterbatasan akses atas lingkungan fisik, informasi dan komunikasi di masyarakat. Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk dunia atau lebih dari satu miliar orang adalah penyandang disabilitas (The World Bank, 2016).

Tidak sesuai antara upaya penanggulangan bencana dengan berbagai kebutuhan penyandang disabilitas membuat kelompok tersebut semakin rentan. Penyandang disabilitas tidak ikut berpartisipasi langsung dalam upaya pengurangan risiko bencana, hal ini berpengaruh pada kesiapan yang belum sensitif terhadap kebutuhan tiap ragam disabilitas. Secara legalitas formal, isu penyandang disabilitas telah disebutkan sebagai salah satu kelompok rentan yang harus diprioritaskan dalam bencana.

Pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana didorong oleh pemikiran bahwa penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar pada saat situasi

darurat bencana, jika kebutuhan khususnya tidak terpenuhi maka kesulitan pun akan meningkat. Sudah saatnya penyandang disabilitas menjadi aktor yang terlibat langsung dalam program, tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat (Sahabat, 2011).

Bencana alam mengakibatkan perubahan lingkungan serta fasilitas yang tidak memadai membuat aksesibilitas difabel makin menurun. Seperti halnya wanita dan anak-anak, penyandang disabilitas dilaporkan menjadi korban bencana alam baik itu terluka maupun tewas akibat bencana dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, kebutuhan serta kerentanan khusus penyandang disabilitas perlu diperhatikan dalam perencanaan program-program penanggulangan bencana, berdasarkan kemampuan mereka sendiri.

Dalam hal ini, pekerja sosial dapat ikut turun dalam memberikan penanggulangan bencana yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas. Pekerja sosial sendiri tidak dapat lepas dari setting kebencanaan karena memiliki karakteristik utama pada praktik pekerjaan sosial yang menekankan kepada individu dan interaksinya dengan lingkungan, dapat diterapkan baik dalam kegiatan pra bencana, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana (Tukino, 2013).

Pelatihan dan peningkatan kompetensi pada pekerja sosial merupakan hal sangat penting dan diperlukan khususnya pada manajemen bencana alam, peran sebagai konselor akan sangat membantu para korban bencana alam agar dapat berfungsi kembali secara normal baik sosial maupun psikisnya. Khususnya pada kelompok penyandang disabilitas yang menjadi fokus utama dalam pra bencana, saat terjadi bencana sampai dengan pemulihan trauma pasca bencana alam.

Pekerja sosial harus mampu memahami berbagai kebutuhan khusus penyandang disabilitas untuk menanggulangi dan menghadapi bencana alam.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya peran pekerja sosial untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana serta pengurangan risiko bencana mulai sebelum terjadi bencana hingga setelah bencana terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas terhadap bencana.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode studi pustaka yang terdiri atas pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen pendukung berupa data dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen elektronik dari internet. Adapun tahapan dalam penulisan diantaranya perumusan masalah untuk kemudian menjadi gagasan, pengumpulan data dan fakta terkait, verifikasi data dan fakta, analisa konseptual, perumusan hasil gagasan dan kesimpulan serta rekomendasi terkait penanganan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan penanggulangan bencana menjadi penting karena mereka lebih mengetahui kebutuhan mereka sendiri. Penyandang disabilitas, meskipun merupakan kelompok rentan, berhak dan layak menjadi garda terdepan dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui pendekatan yang inklusif dan komprehensif untuk mengurangi kerentanan bencana.

Perlu dicatat bahwa bencana alam memunculkan kelompok penyandang disabilitas, yaitu korban cedera atau malfungsi organ yang akan mengalami disabilitas jika tidak ditangani dengan baik; penyandang disabilitas sebelum bencana; dan orang-orang dengan gangguan fungsi organ sebelum bencana yang akan mengalami kecacatan jika akses dan infrastruktur kesehatannya rusak akibat bencana. Kelompok ini mengalami masalah yang hampir sama dalam situasi bencana, ketika fasilitas dan penanganan yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhannya sehingga penderitaan dan kerentanan yang dialami berlipat ganda jika dibandingkan dengan korban bencana lainnya. Penghormatan terhadap hak asasi penyandang disabilitas harus tercermin dalam semua aspek kehidupan, termasuk upaya penanggulangan bencana (Probosiwi, 2013).

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 27 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Amanat tersebut membuka peluang bagi pekerja sosial untuk terlibat dalam penanganan bencana baik pra-bencana, masa tanggap darurat, maupun pasca bencana. Peran pekerja sosial pasca bencana sangat diperlukan karena orang yang terdampak bencana sangat membutuhkan dukungan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Seorang pekerja sosial membantu korban yang luka maupun mereka yang ditinggalkan oleh korban yang meninggal, memulihkan sarana transportasi, mengumpulkan informasi tentang bencana, dan membantu kelompok-kelompok yang rentan. Pekerja sosial juga dapat membantu pemerintah dalam kelancaran distribusi uang tunai, penyediaan rumah sementara bagi korban,

serta konseling bagi korban yang selamat (Javadian, 2007).

Hal ini sesuai dengan teori sistem yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit. Apabila suatu sub sistem tidak berfungsi, maka sistem tidak akan berjalan maksimal. Intinya, setiap bagian berpengaruh terhadap keseluruhan atau sesuatu tidak dapat ada tanpa keberadaan yang lain. Teori sistem banyak memberikan sumbangan pada praktek pekerjaan sosial mikro dan makro. Pada praktek mikro teori sistem dapat digunakan untuk menggali masalah anak dengan keluarga. Sedangkan sumbangan teori sistem terhadap praktik pekerjaan sosial makro adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu sub sistem terhadap sub sistem lainnya atau terhadap sistem yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial, baik dilihat dari aspek objektif, seperti masyarakat, maupun aspek subyektif, seperti nilai-nilai budaya, agama, dan lain sebagainya.

Banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat keadaan bencana, terutama pada saat tanggap darurat, termasuk pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana khususnya penyandang disabilitas.

1. Berfokus pada korban luka/cedera dikarenakan berisiko mengalami disabilitas sementara ataupun permanen.
2. Penyandang disabilitas harus disertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi namun dengan kebutuhan khusus.
3. Penyandang disabilitas berisiko mendapatkan cedera, terperangkap, terjebak, dan lain lain karena kurangnya kemampuan mereka untuk mengantisipasi dan bereaksi.

4. Berfokus pada penyandang disabilitas yang sendirian dan belum memperoleh bantuan.
5. Mengidentifikasi penyandang disabilitas.
6. Personil pencarian, penyelamatan dan evakuasi harus memiliki pengetahuan tentang cara adaptasi teknik pencarian dan penyelamatan untuk menangani penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas.

Dalam menghadapi kerentanan fisik, banyak cara mudah dan murah yang bisa dilakukan. Pertama, dengan mengidentifikasi orangnya, jenis disabilitasnya, dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan risiko bencana. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas akan risiko yang mereka hadapi dan cara menghadapinya, meningkatkan keamanan rumah dan tempat kerja mereka, memindahkan mereka ke tempat yang aman jika terjadi bencana, dan memenuhi kebutuhan khusus mereka setelah keadaan darurat. Dalam menghadapi bencana, metode yang digunakan terutama dalam mengkomunikasikan risiko dan sistem peringatan dini berbeda untuk setiap jenis kecacatan. Berdasarkan Handicap International (2005), spesifisitas dan kompleksitas setiap jenis disabilitas membuat penanganan dan kebutuhannya juga spesifik. Tabel 1 menunjukkan sistem peringatan yang disesuaikan dengan jenis disabilitas yang umum.

**Tabel 1.** Disabilitas dan Kaitannya dengan Sistem Peringatan Bencana

Jenis Disabilitas	Kebutuhan	Sistem Peringatan Bencana
Gangguan visual	a. Landmarks/ petunjuk Hand-rails c. Dukungan personal d. Pencahayaan yang baik e. Antrian yang terpisah	a. Sistem sinyal berbasis suara b. Pengumuman lisan c. Poster yang ditulis dengan huruf besar dan warna yang mencolok
Gangguan pendengaran	a. Alat bantu penglihatan b. Komunikasi dengan gambar c. Antrian terpisah	a. Sistem sinyal berbasis visual berupa simbol, bendera, dan sebagainya b. Gambar c. Sinyal kedip lampu
Gangguan fisik	a. Baju hangat/ selimut b. Kasur, tempat kering, dan alat higienis c. Dukungan personal d. Alat bantu e. Sarana publik yang telah dimodifikasi f. Antrian terpisah	a. Sistem sinyal berbasis suara b. Pengumuman lisan
Gangguan mental	a. Berbicara pelan b. Berbahasa yang sederhana c. Dukungan personal d. Antrian terpisah	a. Sinyal khusus berupa simbol, bendera, dan sebagainya b. Pengumuman yang jelas dan lengkap oleh tenaga siaga bencana

Sumber: Handicap International (2005).

Keterbatasan fisik yang mereka alami, menyebabkan mereka membutuhkan pelayanan atau fasilitas khusus yang mendukung mobilitas mereka pada saat terjadi bencana. Diperlukan desain-desain bangunan berbasis disabilitas di bangunan sekolah, kantor, rumah sakit, taman, jembatan, dan jalan umum. Misal dengan jalur khusus pegangan tangan, menghindari jalan berundak, melengkapi jalan dengan penunjuk arah bagi penderita low vision ataupun tuna netra.

Pelatihan dan bimbingan penanganan penyandang disabilitas pada saat dan setelah bencana menjadi hal yang

mutlak selain pelibatan mereka dalam perencanaan upaya persiapan dan mitigasi bencana. Pelibatan penyandang disabilitas ke dalam sistem dan proses penanggulangan bencana, tentu tidak dapat dicapai apabila tidak ada kerjasama dan niat baik dari semua pihak: masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam tata kelola pemerintahan membutuhkan koordinasi dari semua pihak.

Pengubahan pola pikir dan cara pandang terhadap penyandang disabilitas harus diawali dari hal-hal kecil. Misalnya

dalam proses perencanaan pembangunan, pemetaan kebutuhan, dan pemecahan masalah dalam situasi apapun, termasuk situasi darurat bencana. Selain itu diperlukan pula upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui peningkatan pengetahuan dan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas, pemberian akses pada pekerjaan dan kehidupan yang layak, pemberian akses untuk berpolitik, dan sebagainya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan penanggulangan bencana akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas dan tertanganinya mereka pada saat bencana terjadi. Namun harus disadari, bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kemampuan teknis, pengetahuan, dan niat baik dari pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya para pekerja sosial yang dapat memberikan peran dalam penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas.

Pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam semua aspek pelayanan sosial dan program pembangunan kesejahteraan sosial harus diwujudkan dan tidak hanya dibicarakan. Pengarusutamaan tidak hanya masalah pemenuhan hak asasi manusia, namun juga melalui program dan kebijakan efektif mulai tahap sebelum sampai sesudah bencana itu terjadi disesuaikan dengan tipe atau jenis disabilitas yang ada.

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana. Hal mudah yang dapat dilakukan adalah dengan

menumbuhkan pengetahuan mengenai penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus mereka pada pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan diharapkan masyarakat lebih mengenal dan menerima penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam program pengurangan risiko harus terus digalakkan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan pengurangan risiko bencana dengan masyarakat yang lain. Pembuatan program pengurangan risiko yang memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus menggunakan media yang aksesibel pula bagi penyandang disabilitas tentunya disesuaikan dengan jenis disabilitas dialami.

Upaya pengurangan risiko bencana dapat dimulai dengan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di SLB melalui penyuluhan, sosialisasi, dan praktek simulasi evakuasi bencana, atau dalam tindakan yang lebih lanjut dengan memasukkan manajemen risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah baik sekolah biasa maupun sekolah luar biasa. Upaya evakuasi atau penyelamatan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan hambatan yang dialami oleh mereka, penyediaan fasilitas fisik dan non fisik salah satunya.

Selain peran pekerja sosial, pelibatan keluarga menjadi penting karena keluarga adalah orang terdekat dan terpercaya oleh penyandang disabilitas, sehingga peran mereka menjadi penting. Pelatihan penyelamatan penyandang disabilitas haruslah diikuti oleh pihak keluarga. Pembuatan basis data yang akurat dan up to date penting dilakukan sebagai dasar assessment kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri. Perlu adanya

kerjasama lintas sektoral dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, serta pihak LSM dalam rangka menghasilkan data disabilitas yang akurat dan tidak simpang siur antar lembaga/organisasi. Penguatan kapasitas juga dapat dilakukan melalui penguatan

sosial ekonomi penyandang disabilitas. Pemberian program padat karya, pemberian pendidikan vokasional dan persiapan dunia kerja, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja penyandang disabilitas dapat menjadi pilihan dalam rangka pengurangan risiko bencana penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handicap international. 2016. Annual Report 2016 Handicap International Network. [Online] Tersedia: [https://handicapinternational.fr/sites/fr/files/documents/files/ra2016-hifed-en\\_0.pdf](https://handicapinternational.fr/sites/fr/files/documents/files/ra2016-hifed-en_0.pdf). [16 Mei 2022]
- Javadian, Reza. 2007. *Social work responses to earthquake disasters: A Social Work Intervention in Bam, Iran*. International Social Work Vol.50 (3)
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung. ALFABETA. hlm 20-21
- Probosiwi, R. 2013. “Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana” dalam *Jurnal Penanggulangan Bencana*.
- Sahabat. 2011. *Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana. Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Mencakup Kecacatan*. Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia: ASB Indonesia dan HI Program Indonesia
- The World Bank. 2016. *Disability Inclusion*. [Online] Tersedia: <https://www.worldbank.org/en/topic/disability>. [6 April 2022].
- Tukino. 2013. *Pekerjaan Sosial dalam Setting Kebencanaan*. Share Vol. 3 No. 2